

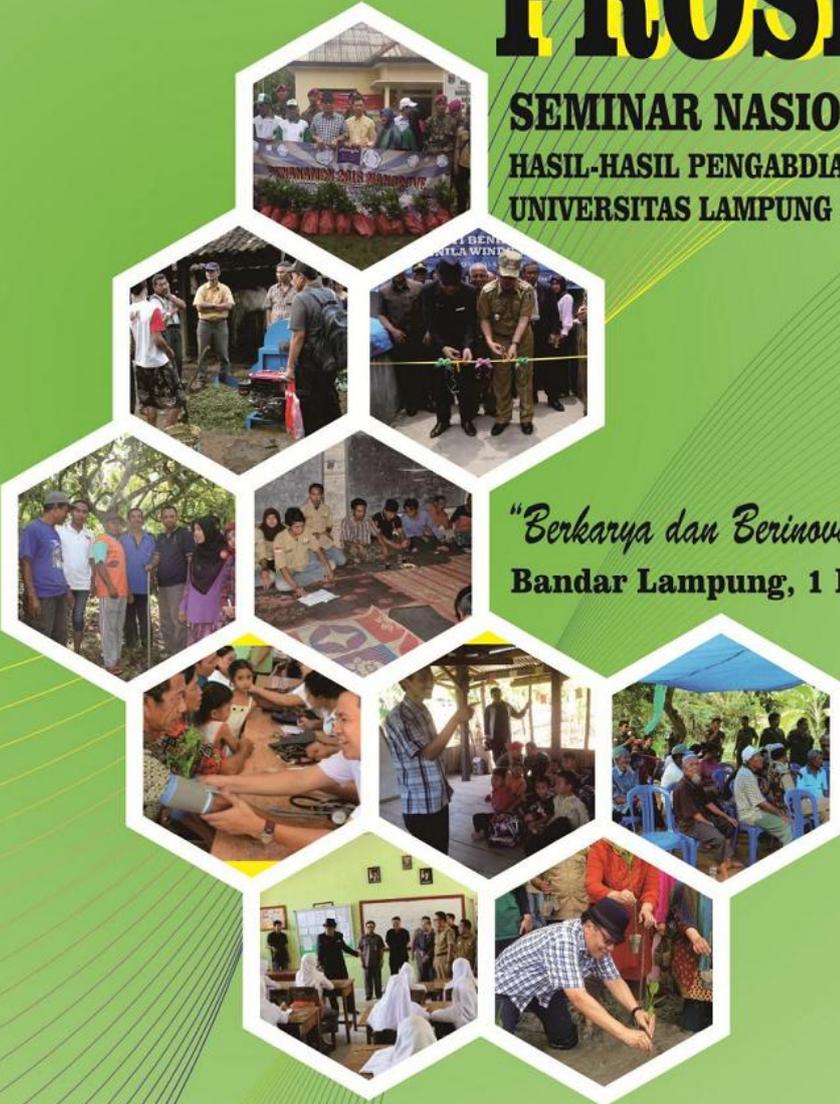
ISBN 978-602-0860-12-1

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

**HASIL-HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG 2016**

"Berkarya dan Berinovasi untuk Bangsa"
Bandar Lampung, 1 Desember 2016



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Lampung**

PEMBERDAYAAN EKOWISATA BAGI KELOMPOK TANI SHK LESTARI DI DESA HANURA, KECAMATAN PADANG CERMIN, KABUPATEN PESAWARAN <i>Gunardi Djoka Winarno, Rahmat Safe'i, Dian Iswandar</i>	124
PEMANTAUAN KESEHATAN HUTAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RAHMAN (TAHURA WAR) <i>Hari Kaskoyo, Rahmat Safe'i</i>	129
MENGATASI KENDALA PENGERINGAN JAMUR MERANG DAN JAMUR TIRAM BAGI INDUSTRI KECIL PEMBUDIDAYA JAMUR DI DUSUN LINGSUH KECAMATAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG DENGAN PERANCANGAN ALAT PENGERING <i>Herti Utami, Yuli Darni, Donny Lesmana</i>	137
PENDIDIKAN POLITIK MENJADI PEMILIH CERDAS BAGI PEMILIH PEMULA DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PILKADA 2015 <i>Himawan Indrajat, Hertanto</i>	146
PENANAMAN AREN UNTUK MENUNJANG INDUSTRI GULA AREN DI KELURAHAN SUMBERAGUNG, BANDAR LAMPUNG <i>Indriyanto, Duryat²⁾</i>	167
DIVERSIFIKASI SUSU KAMBING PERAH PRODUKSI KELOMPOK TANI TERNAK DI DESA SUNGAI LANGKA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN <i>Idalina Harris, Liman, Veronica Wanniatie</i>	177
IBM KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN DI KECAMATAN GEDONG TATAAN MELALUI APLIKASI TEKNOLOGI PAKAN APUNG BERBASIS BAHAN BAKU LOKAL <i>Limin Santoso, Siti Hudaidah, Tarsim</i>	186
PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) KERIPIK PISANG DI DESA WAY HALOM KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS <i>Linda Septarina</i>	201
PEMANFAATAN LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK KEAMANAN TAMBAK IKAN AIR TAWAR MENGGUNAKAN LAMPU LED DI DESA PAGELARAN, KECAMATAN PAGELARAN, KABUPATEN PRINGSEWU, LAMPUNG <i>Lukmanul Hakim, Gigih Forda Nama, Diah Permata, Abdul Haris</i>	206
UPAYA PENGEMBANGAN PULAU PASARAN, BANDAR LAMPUNG SEBAGAI AREAL MINAWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMONITY BASED MARINE TOURISM) <i>Mahrus Ali, Sri Ratna Sulistyanti, Lindrianasari, Eko Efendi</i>	215

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

v



PENDIDIKAN POLITIK MENJADI PEMILIH CERDAS
BAGI PEMILIH PEMULA DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA
PILKADA 2015

*Political Education To Be A Smart Voters For Beginners Voters In Bandar
Lampung Local Head Election 2015*

Himawan Indrajat¹⁾, Hertanto²⁾

- 1) Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
2) Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

ABSTRAK

Provinsi Lampung pada bulan desember tahun 2015 akan melakukan pemilihan kepala daerah langsung untuk memilih Bupati/Walikota secara serentak di delapan kabupaten/kota. Delapan kabupaten/kota yang akan melakukan pemilihan kepala daerah tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesisir Barat. Kota Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak pada tahun 2015. Persaingan para bakal calon walikota di Kota Bandar Lampung sudah semarak, baik bakal calon independen (bakal calon yang berasal dari masyarakat) dan bakal calon yang akan diusung oleh partai politik. Mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Bandar Lampung agar dikenal masyarakat serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan apabila mendaftar partai politik diharapkan partai politik tertarik untuk menjadikan bakal calon tersebut menjadi calon yang diusung partai politik pada pilkada 2015. Sebagai ibu kota provinsi lampung, tentu menarik untuk melihat seperti apa karakteristik pemilih di Kota Bandar Lampung, dengan menjadikan pemilih di Kota Bandar Lampung sebagai objek pengabdian tentang pendidikan politik, khususnya pemilih pemilih pemula. Karena dalam pemilihan kepala daerah, pemilih pemula merupakan pendulang suara yang paling potensial, karena pemilih pemula masih bisa dikatakan awam dengan perpolitikan sehingga masih mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Dan bagi calon kepala daerah petahana tentu popularitasnya lebih dikenal oleh pemilih pemula, apalagi calon kepala daerah petahana biasanya memanfaatkan posisinya yang menguasai birokrasi dan penentu kebijakan untuk mencari simpati pemilih.

Kata Kunci : *Pemilih Pemula, Pemilih Cerdas, Pemilihan Kepala Daerah*

ABSTRACT

Lampung Province in December 2015 will be held direct local head elections to choose a Mayor in simultaneously at eight regencies / cities. Eight regencies / cities that will conduct the local elections is Bandar Lampung City, Metro City, Lampung Tengah Regency, Lampung Timur Regency, Lampung Selatan regency, Pesawaran Regency, Way Kanan Regency, and Pesisir Barat Regency. Bandar



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Lampung**

Lampung is one of city that will held direct local head elections simultaneously in 2015. Competition of the prospective candidates for mayor in the city of Bandar Lampung is already overflowing, both independent candidates (candidates from the community) and the candidates will be carried by political parties. They disseminate to the people of Bandar Lampung to be known to the public and gain support from the community. And if the political parties are expected to register political parties are interested in making these candidates become candidates fielded by political parties in the elections of 2015. As the capital of Lampung province, is certainly interesting to see what the characteristics of the voters in the city of Bandar Lampung, by making the voters in the city of Bandar Lampung as an object of devotion with political education, particularly voter voters. Due to the local elections, voters are most potesial pendulang voice, because voters can still be said to be new to politics so that they are easy to be influenced by others. And for the prospective head region popularity petahana certainly better known to voters, let alone the incumbent regional head candidates usually take advantage of its position in charge of the bureaucracy and policy makers to seek voters.

Keywords: *Beginer Voters, Smart Voters, Local Head Election*

PENDAHULUAN

Setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada bulan Mei 1998 melalui gerakan reformasi, terjadi perubahan kearah demokratisasi pada tingkatan nasional maupun lokal. Dimulai dari pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden Habibie. Pemerintah Habibie kemudian melakukan pembaharuan besar dalam otonomi daerah dan pemerintahan daerah indonesia sebagai upaya demokratisasi hubungan pusat da, dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur melalui Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Melalui Undang-undang tersebut daerah tidak hanya memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur urusan pemerintah mereka sendiri serta relatif mandiri, melainkan juga mempunyai posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang kuat dalam berhadapan dengan pemerintah pusat.¹

Kewenangan yang sangat luas pada daerah tersebut antara lain pada pemilihan kepala daerah dan pemekaran daerah. Pemilihan kepala daerah meskipun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipilih secara tidak langsung melalui DPRD tetapi intervensi pemerintah pusat tidak lagi ada. Dan pada pemekaran daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menghapus, menggabungkan, serta memekarkan daerah menjadi lebih satu daerah.

Ternyata dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengalami kendala pada tataran konsepsional maupun prakteknya. Pada berbagai daerah terjadi kendala dihampir seluruh aspek substansial dari otonomi daerah yang meliputi : Kewenangan, Kelembagaan, Personil/Kepegawaian Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, Pengawasan, dan Hubungan DPRD Kabupaten/Kota

¹ Syamsudin Haris, *Format Baru Otonomi Daerah: Catatan Pendahuluan dalam Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Syamsudin Haris, ed, (Jakarta, LIPI Press, 2006), hal 7.





Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

dengan Eksekutif (Pemkab/Pemkot).² Sedangkan menurut Riswanda Imawan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah ketika masih berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah :³

1. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia daerah dalam menghadapi otonomi daerah.
2. Otonomi daerah hanya menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah.
3. DPRD bertindak melampaui kewenangannya, karena lebih mengutamakan fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi maupun fungsi anggaran terjadi "legislative heavy".
4. Menonjolnya daerahisme dalam pengangkatan pejabat di daerah dengan mengorbankan prinsip-prinsip profesionalisme.
5. Bupati dan Walikota tidak bersedia dikordinasi oleh Gubernur, karena dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tidak ada hubungan hierarkis antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Permasalahan lainnya dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah peluang terjadinya praktek politik uang (*money politics*) pada Pemilihan Kepala Daerah karena pemimpin daerah dipilih secara tidak langsung oleh wakil rakyatnya (DPRD), serta permasalahan syarat pemekaran yang begitu mudah sehingga banyak Daerah Otonom Baru yang muncul. Kemudian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyempurnakan dan memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang pada awalnya dipilih secara tidak langsung dirubah dengan dilaksanakan secara langsung, dan juga memperketat syarat pemekaran.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung, yang kemudian diatur secara khusus melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung, rakyat akan memiliki kedaulatan penuh untuk mengekspresikan hak-hak politiknya memilih calon kepala daerah yang menurut mereka memang mampu dan layak untuk memimpin daerah tersebut.

Pada akhir tahun 2014 kemarin sempat muncul kontroversi ketika Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 pada akhir masa jabatannya mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga memunculkan pro dan kontra pada masyarakat, pihak yang kontra menganggap dengan dikembalikannya kembali kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah menunjukkan kemunduran pada proses

² Solahudin Kusumanegara, Demokratisasi Di Tingkat Lokal Studi Kasus: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas, dalam Jurnal Swara Politika, Hal 20 Vol.3 No.2, Oktober 2003, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

³ Riswanda Imawan, "Catatan Tentang Otonomi Daerah", Makalah pada Stadium General FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2001.





Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

demokratisasi di Indonesia. Kemudian presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespon dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebagai konsekuensi (penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014) dan untuk memberikan kepastian hukum, Presiden juga menerbitkan juga Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," sebut Presiden. Inti perppu ini, lanjut Presiden, adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.⁴

Pada perkembangannya DPR RI periode 2014-2019 kemudian mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, dan disempunakan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang disah presiden Joko Widodo.⁵

Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level lokal. Tip O'Neill, menyatakan bahwa *'all politics is local'* yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu.⁶ Dan sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekati aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih.⁷

Pilkada secara langsung adalah proses demokratisasi karena merupakan pembelajaran politik yang relevan dan merupakan upaya memperkuat sistem lokal dan otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi. Pilkada langsung adalah suatu bentuk pembelajaran politik yang sangat penting. Dalam konteks pembelajaran politik pemilihan langsung mencakup tiga pembelajaran.⁸

1. Meningkatkan kesadaran politik (conscientization) masyarakat lokal, karena dalam proses pemilihan dimana warga lokal terlibat akan terbentuk pemahaman terhadap realitas sosial politik yang ada dan kemungkinan mereka secara aktif mengubahnya. Dalam konteks ini kedaulatan rakyat menjadi lebih mudah dipahami.
2. Mengorganisir masyarakat ke dalam suatu aktivitas politik yang memberi peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi. Pengorganisasian masyarakat mengaktifkan dan mendidik anggota masyarakat menjadi warga

⁴<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/21435921/batalkan.pilkada.tak.langsung.presiden.sb.y.terbitkan.2.perppu> diakses pada Kamis 11 Juni 2015

⁵ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/17/078643284/Hujan-Interupsi-Warnai-Pengesahan-Revisi-RUU-Pilkada> diakses pada Kamis 11 Juni 2015

⁶ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 17.

⁷ Budi Winarno, *Membangun Sistem Politik Demokrasi di Indonesia*; dalam *Jurnal Swara Politika*, hal 11 Vol II No. 2 September 2003. Laboratorium Ilmu Politik-Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

⁸ Andi Ramses M, *Pemilihan Kepala Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-undang No.22 Tahun 1999, dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Andi Ramses M, ed. (Jakarta, MIPI, 2009), hal. 346



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Lampung**

negara yang proaktif dalam proses-proses politik yang berlangsung, khususnya ditingkat lokal.

3. Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Pilkada langsung juga merupakan even politik penting, karena merupakan arena kompetisi bagi para politisi lokal untuk memperebutkan jabatan Kepala Daerah dengan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya. Sehingga Pilkadada merupakan arena tempat berlangsungnya pertarungan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, ataupun kekuatan sosial untuk meraih simpati pemilih dan merebut kekuasaan ditingkat lokal.⁹

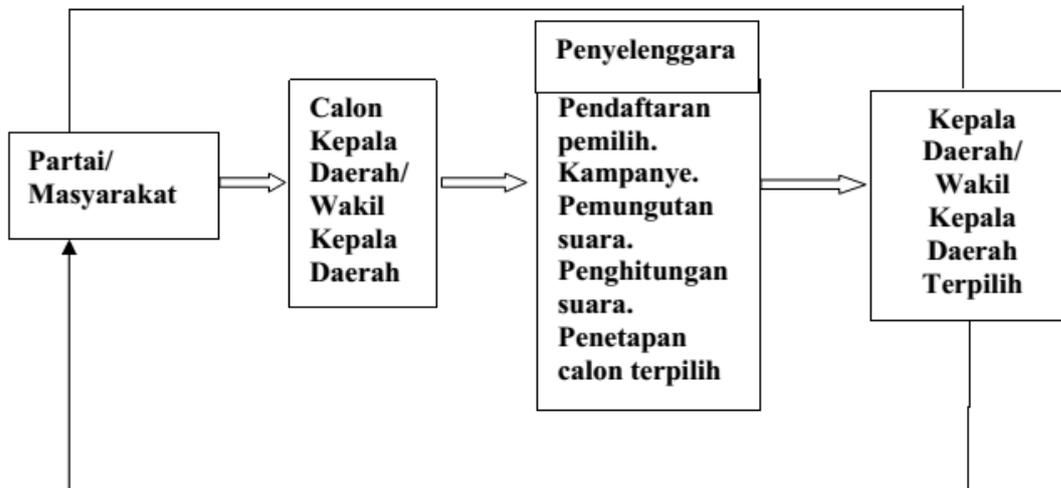
Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Pengertian jabatan publik mengandung pengertian bahwa kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat (publik), berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat. Adapun pengertian pejabat politik adalah mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan dengan mekanisme politik, yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik, seperti rakyat dan partai-partai politik.¹⁰

Proses pilkada langsung yang demokratis digambarkan dalam bagan dibawah ini. Arus input mengalir bukan dari partai politik semata-mata namun juga dari kelompok diluar partai politik. Calon kepala daerah berasal dari partai politik atau perseorangan di luar partai politik. Mereka menjalani proses, yakni menyelesaikan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari penelitian syarat calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, sampai penetapan calon terpilih. Pada masa pendaftaran, calon mengajukan persyaratan untuk diteliti oleh penyelenggara. Penelitian tersebut bersifat administratif belaka sehingga sering disebut dengan seleksi administratif. Dalam masa kampanye, calon berlomba merebut simpati rakyat dengan cara menawarkan visi, misi dan program kerja. Output proses pilkada langsung adalah pasangan calon kepala daerah terpilih hasil seleksi masyarakat dalam pemungutan suara.

⁹ Bambang Purwoko, *Isu-isu Strategis Pilkada Langsung: Ekspresi Kedaulatan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*; Dalam *Jurnal Swara Politik*, hal 5 Vol 6 No. 1 April 2005. Laboratorium Ilmu Politik-Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

¹⁰ Joko J. Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-LP3M Universitas Wahid Hasyim), hal. 203.

Gambar. 1
Model Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung



Sumber : Joko J. Prihatmoko, 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia

A. Permasalahan

Provinsi Lampung pada bulan desember tahun 2015 akan melakukan pemilihan kepala daerah langsung untuk memilih Bupati/Walikota secara serentak di delapan kabupaten/kota. Delapan kabupaten/kota yang akan melakukan pemilihan kepala daerah tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Kota Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak pada tahun 2015. Persaingan para bakal calon walikota di Kota Bandar Lampung sudah semarak, baik bakal calon independen (bakal calon yang berasal dari masyarakat) dan bakal calon yang akan diusung oleh partai politik. Mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Bandar Lampung agar dikenal masyarakat serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan apabila mendaftar partai politik diharapkan partai politik tertarik untuk menjadikan bakal calon tersebut menjadi calon yang diusung partai politik pada pilkada 2015.

Sebagai ibu kota provinsi lampung, tentu menarik untuk melihat seperti apa karakteristik pemilih di Kota Bandar Lampung, dengan menjadikan pemilih di Kota Bandar Lampung sebagai objek pengabdian tentang pendidikan politik, khususnya pemilih pemilih pemula. Karena dalam pemilihan kepala daerah, pemilih pemula merupakan pendulang suara yang paling potensial, karena pemilih pemula masih bisa dikatakan awam dengan perpolitikan sehingga masih mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Dan bagi calon kepala daerah petahana tentu popularitasnya lebih dikenal oleh pemilih pemula, apalagi calon kepala daerah petahana biasanya memanfaatkan posisinya yang menguasai birokrasi dan penentu kebijakan untuk mencari simpati pemilih.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan permasalahan terkait pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Pilkada 2015 di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Pilkada langsung merupakan wadah bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang mampu memajukan daerahnya dan mensejahterakan rakyatnya. Sehingga masyarakat perlu diberikan pendidikan politik manfaat dari Pilkada langsung, sehingga partisipasi politik masyarakat dapat tinggi khususnya partisipasi pemilih.
2. Perilaku pemilih di Indonesia cenderung pemilih yang tidak rasional mereka cenderung memilih karena pengaruh lingkungannya, karena ikatan emosional, karena hubungan keluarga, pengaruh teman atau bisa juga terpengaruh ketokohan seseorang. Bahkan politik uang yang dilakukan peserta pemilu, oleh karena itu diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat agar bisa menjadi pemilih yang cerdas.

B. Studi Pustaka

1. Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat. Jalan konkrit untuk mengorganisasikan bentuk pemerintahan ini dan pertanyaan mengenai kondisi dan prakondisi yang dibutuhkan telah diperdebatkan secara intensif.¹² Istilah demokrasi sendiri berasal dari gabungan dua kata bahasa Yunani: yaitu demos (yang berarti rakyat) dan kratos (pemerintah) jadi definisi dari demokrasi adalah "pemerintahan oleh rakyat" definisi ini terasa sangat lugu sehingga memunculkan isu yang sangat kompleks salah satunya adalah siapakah yang dimaksud dengan "rakyat"?¹³ Robert Dahl juga mempertanyakan definisi demokrasi, karena dalam demokrasi apa yang dinamakan rakyat menjadi kabur dan seringkali menjadi sumber perdebatan: seperti apakah yang merupakan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis. Sebab dalam pemerintahan yang demokratis, rakyat yang memerintah hanyalah kumpulan orang-orang tertentu yang berhak ikut serta memerintah.¹⁴

Bagi Dahl demokrasi merupakan suatu sistem politik yang tiap anggotanya saling memandang antara satu dengan yang lainnya sebagai orang yang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri.¹⁵ Sedangkan Juan Linz mendefinisikan demokrasi sebagai berikut apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui

¹² Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 1.

¹³ David Held, *Models of Democracy*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007), xviv.

¹⁴ Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), xiv.

¹⁵ Robert Dahl, *op.cit*, xxviii.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

organisasi politik yang ada. Di samping itu, sejauh mana kompetisi antar pemimpin dalam sistem demokrasi dilakukan secara teratur dalam mengisi jabatan politik baik itu ditingkatan nasional maupun lokal.¹⁶

Demokrasi menurut Samuel Huntington menghasilkan sebuah gelombang demokratisasi yang menyebar pada banyak negara, gelombang demokratisasi sendiri adalah sekelompok transisi dari rezim-rezim nondemokratis ke rezim-rezim demokratis, yang terjadi pada kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya juga mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis. Dan sebuah gelombang demokratisasi dapat berubah menjadi gelombang balik dimana sebagian negara yang sebelumnya telah beralih ke sistem demokratis berbalik ke sistem non demokratis.¹⁷

Jadi demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis. Dan demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat. Dengan demikian prinsip "setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu didesentralisasikan". Menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi.¹⁸

Sedangkan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia mulai kembali berjalan pada tahun 1998, setelah 32 tahun dibawah rezim non demokratis kemudian berganti ke rezim yang demokratis. Banyak perubahan yang dilakukan pada sistem politik di Indonesia yang tadinya tidak demokratis menjadi demokratis, salah satunya adalah dalam pola hubungan pusat dan daerah yang tadinya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi, yaitu daerah diberikan kewenangan atau otonomi untuk mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri, dimana masyarakat daerah juga ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan didaerahnya seperti dalam pemilihan legislatif di daerah, pemilihan kepala daerah langsung dan termasuk juga dalam kebijakan pemekaran wilayah, dimana daerah dapat melakukan pemekaran wilayahnya jika terdapat aspirasi dari masyarakatnya.

2. Perilaku Politik

Perilaku politik pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dimensi serta latar belakang dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan penegakkan keputusan. Perilaku politik dirumuskan sebagai sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan

¹⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 4.

¹⁷ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997), 13.

¹⁸ Riswanda Imawan, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Syamsudin Haris (ed), (Jakarta: LIPI dan PGRI, 2005), 43.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang masyarakat.

Perilaku politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Dalam suatu negara, misalnya, ada pihak yang memerintah, dan pihak lain diperintah. Terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada yang setuju dan ada yang kurang setuju. Yang selalu melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan partai politik karena fungsi mereka dalam bidang politik. Keluarga sebagai suatu kelompok melakukan berbagai kegiatan, termasuk didalamnya adalah kegiatan politik. Dalam hal para anggota suatu keluarga secara bersama memberi dukungan pada organisasi politik tertentu, memberikan iuran, ikut berkampanye menghadapi pemilu, keluarga yang bersangkutan telah berperan dalam kegiatan politik, disamping kegiatan lain.

Perilaku politik aktor politik seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan penegakan keputusan dipengaruhi oleh berbagai dimensi latar belakang yang merupakan bahan dalam pertimbangan politiknya. Demikian juga warga negara biasa menurut Ramlan Surbakti, dalam berperilaku politik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang, terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik:¹⁹

- 1) Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya.
- 2) Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung itu memberikan bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya.
- 3) Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian diperlukan pemahaman terdapat tiga basis fungsional sikap yaitu, kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri;
 - a. Kepentingan, merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan, artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut.
 - b. Penyesuaian diri, merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Artinya penilaian terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk sesuai atau selaras dengan objek tersebut.
 - c. Eksternalisasi dan pertahanan diri, merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri seperti: proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan agresor

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1982), hal 133



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

- 4) Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan sesuatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Pada lingkungan sosial politik langsung sangat mempengaruhi perilaku politik seperti yang telah disebutkan diatas yaitu keluarga, lingkungan pendidikan/sekolah, agama dan peer group. Lingkungan-lingkungan sosial itu merupakan lingkungan yang memberikan sumbangan bagi perkembangan pemikiran-pemikiran, norma-norma, nilai, dan etika pergaulan. Di dalam misalnya keluarga terjadi pembiasaan menurut sikap dan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam keluarga tersebut. Pandangan-pandangan itu memiliki pengaruh dalam kehidupan tingkah laku politik.

Gabriel Almond menyebutkan ada enam sarana (agen sosialisasi politik) yang memberikan orientasi politik dan pola tingkah laku individu, enam sarana tersebut juga masuk dalam lingkungan sosial politik langsung yaitu :²⁰

- 1) Keluarga, merupakan lembaga yang pertamakalinya dijumpai oleh seorang individu. Begitu seorang manusia lahir, maka yang bersangkutan akan langsung berhadapan dengan keluarganya. Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling awal dimasuki seorang individu.
- 2) Sekolah, sebagai sarana sosialisasi politik merupakan sesuatu hal yang wajar. Hal ini dikarenakan di sekolah individu-individu, terutama kaum muda, mendapatkan pengetahuan di bidang politik dan mengetahui peranan mereka didalamnya.
- 3) Peer group, disini sikap-sikap politik seseorang dibentuk, karena dikelompok bergaul seorang individu akan melakukan suatu tindakan tertentu karena teman-teman didalam kelompoknya melakukan tindakan itu. Individu merubah kepentingannya dan tingkah lakunya agar dapat sesuai dengan kelompoknya dimana ia berada. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar individu tersebut dapat diterima di dalam kelompoknya.
- 4) Pekerjaan, organisasi-organisasi formal maupun non formal yang dibentuk atas dasar pekerjaan, juga merupakan sarana sosialisasi politik. Organisasi ini dapat berwujud serikat kerja atau serikat buruh. Organisasi ini berfungsi sebagai penyuluh bagi anggotanya dibidang politik.
- 5) Media massa, surat kabar, majalah, radio, televisi memegang peranan yang sangat penting. Melalui media massa, masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi politik.
- 6) Kontak-kontak politik langsung, kontak-kontak politik langsung juga merupakan suatu sarana sosialisasi politik. Sikap, nilai, orientasi, yang tertanam sejak kecil melalui berbagai sarana sosialisasi politik inilah yang ikut serta membentuk nilai sikap dan norma yang dimiliki seseorang dan berpengaruh pada tingkat partisipasi politiknya.

²⁰ Haryanto, Sistem Politik Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Libertry, 1992) hal 3.





3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik warga negara. Definisi partai politik menurut Huntington dan Nelson adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal. Efektif atau tidak efektif.²²

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Definisi umum partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.²³

Partisipasi politik sendiri menurut Huntington dan Nelson dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation* atau *self motion*) yaitu partisipasi yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri. Dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*) yaitu partisipasi yang dilakukan atas tekanan, manipulasi, paksaan dan desakan dari pihak lain, bagi negara yang berlandaskan demokrasi, partisipasi politik otonom lebih dipentingkan karena partisipasi yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri, secara sukarela dan bukan tekanan atau balas budi pada pihak lain, orang-orang yang berpartisipasi mobilisasi belum tentu mengerti apa yang mereka lakukan, mereka melakukan tindakan tersebut karena suruhan dari

²² Samuel P. Huntington dan Joan P. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 6.

²³ Miriam Budiardjo (Ed), *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), H. 4





Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

orang lain, bukan atas kehendak sendiri. Namun sulit sekali membedakan antara partisipasi otonom atau partisipasi yang dimobilisasi.²⁴

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk dan jenis-jenisnya yaitu: Pertama, kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan bagi seseorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kedua, lobbying mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka menyangkut persoalan sejumlah besar orang. Ketiga, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan umum yang beraneka ragam. Keempat, mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Dan terakhir kelima, yaitu tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau harta benda.²⁵

4. Kebijakan Publik

Dalam kehidupan moderen seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial (social welfare), dibidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berhasil namun juga ada yang gagal. Oleh karena luasnya dimensi yang dipengauhi oleh kebijakan publik, maka kita dapat mengajukan pertanyaan apa sebenarnya kebijakan publik.¹¹

Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D Lasswell dan abraham kaplan memberi arti kebijaksanaan sebagai "suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah". Carl j. Freidrick mendefinisikan kebijaksanaan sebagai "serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita denga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah

²⁴ Samuel P. Huntington dan Joan P. Nelson, *Op.cit*, H. 9

²⁵ Samuel P. Huntington dan Joan P. Nelson, *Ibid*, H. 16-18

¹¹ Budi Winarno, "Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus", (Yogyakarta: CAPS, 2012) H.18





**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Lampung**

ilmu politik. Istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti dalam “Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, “Kebijakan Ekonomi Jepang” atau “Kebijakan Pertanian di Negara-negara Berkembang”. Namun, istilah ini mungkin juga dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Menurut Charles O.Jones dalam Budi Winarno, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program (programs), keputusan (decisions), standard, proposal dan grand design.

C. Tujuan Kegiatan

1. Tujuan Umum

Kegiatan ini bertujuan agar adalah memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula agar mereka bisa cerdas dan kritis dalam memilih calon kepala di Pilkada Kota Bandar Lampung 2015.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan pengetahuan tentang manfaat pemilihan kepala daerah langsung.
- b. Memberikan pengetahuan hubungan pemilihan kepala daerah dan kebijakan publik.
- c. Memberikan pengetahuan tentang partisipasi politik mandiri dan kritis.

3. Manfaat Kegiatan

- a. Peserta memiliki pengetahuan tentang manfaat pemilihan kepala daerah.
- b. Peserta memiliki pengetahuan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c. Peserta menjadi pemilih cerdas, mandiri dan kritis.

Sasaran dari kegiatan ini adalah pemilih pemula di Kota Bandar Lampung yang berasal dari Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi, tiap SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dapat mengirimkan perwakilan siswa yang aktif menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Majelis Permusyawaratan Kelas, atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di kota Bandar Lampung yang tertarik pada pendidikan politik untuk hadir di acara ini. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan pendidikan politik ini mereka dapat menjadi pemilih cerdas, mandiri dan kritis. Serta dapat mempengaruhi teman mereka di sekolah atau teman sepermainan untuk menjadi pemilih cerdas.





A. Kerangka Pemecahan masalah

Untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan pada bagian permasalahan dan tujuan kegiatan, maka kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini seperti terlihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Kerangka Pemecahan Masalah

NO.	Kondisi Saat Ini	<i>Threatment</i> (Perlakuan)	Kondisi yang Diharapkan
1.	Peserta belum memahami apa itu pemilihan kepala daerah dan manfaatnya	Memberikan pendidikan politik tentang manfaat pemilihan kepala daerah	Peserta memahami apa itu pemilihan kepala daerah
2.	Peserta belum memahami tentang kebijakan publik	Memberi penyuluhan tentang kebijakan publik dan hubungannya dengan pemilihan kepala daerah	Peserta memahami konsep kebijakan publik
3.	Peserta belum memahami partisipasi politik dan menjadi pemilih cerdas	Memberikan penyuluhan tentang apa itu pemilih cerdas	Peserta memahami bagaimana menjadi pemilih yang mandiri, cerdas dan kritis

Untuk menjamin tercapainya tujuan (kondisi yang diharapkan) maka penyampaian materi penyuluhan tidak hanya bersifat monologis, akan tetapi lebih bersifat dialogis dan memberikan simulasi yang berkenaan dengan bagaimana membangun strategi melalui identifikasi masalah dan potensi yang dimiliki serta simulasi tentang pendidikan politik.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan seminar penguatan organisasi ini dilakukan dengan cara:

1. Penjajagan pengetahuan dan pemahaman peserta seminar dengan menggunakan evaluasi awal melalui pre test. Cara ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta pendidikan politik tentang pilkada, partisipasi politik, kebijakan publik dan pemilih cerdas.





Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

2. Memberikan materi seminar berupa makalah dan simulasi yang berkaitan dengan pilkada, partisipasi politik, dan kebijakan publik.
3. Evaluasi akhir melalui post test dan diskusi atas masalah-masalah yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang disampaikan.

C. Metode Kegiatan

1. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah seminar/ceramah tentang pilkada, partisipasi politik, dan kebijakan publik.
2. Kegiatan ini juga menggunakan metode simulasi tentang bagaimana mengkritisi visi dan misi para calon kepala daerah.

PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam rangka pengabdian “Pendidikan Politik Menjadi Pemilih Cerdas Bagi Pemilih Pemula di Kota Bandar Lampung” dilakukan pada Hari Sabtu, 10 Oktober 2015 bertempat di lantai 4 Gedung F FISIP Universitas Lampung. Peserta pada pelatihan ini adalah siswa SMA dan Mahasiswa di Kota Bandar Lampung yang tercatat sebagai pemilih di Pilkada di Kota Bandar Lampung 2015. Pemilihan tema pendidikan politik bagi pemilih pemula di kota bandar lampung, karena pada tanggal 9 desember 2015 kota Bandar Lampung akan melaksanakan Pilkada Serentak untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung.

Pemilih pemula di Kota Bandar Lampung Jumlahnya sangat signifikan. Seperti dikutip oleh salah satu portal berita di kota Bandar Lampung Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Fadila Sari yang menjabat juga sebagai Ketua Pokja Sosialisasi mengatakan terdapat 11.378 pemilih pemula di Kota Bandar Lampung berkesempatan memberikan suara pada Pilwakot 2015. KPU Kota Bandar Lampung melakukan berbagai upaya agar semuanya tidak golput dan memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah nanti.¹²

Sementara jumlah pemilih secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung pada DPT yang diumumkan oleh KPU Kota Bandar Lampung, menetapkan jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2015 adalah 630.366 orang. DPT ini tersebar pada 20 Kecamatan, 126 Desa/Kelurahan dan 1.300 TPS di Kota Bandar Lampung.¹³

Sebelum materi diberikan, dilakukan terlebih serangkaian pre test untuk mengetahui pemahaman peserta (pemilih pemula) terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan. Beberapa pertanyaan pre-test sekaligus menjadi pertanyaan post-test dalam kerangka membandingkan hasil pengabdian tersebut berkisar tentang :

¹² <http://www.saibumi.com/artikel-69393-kpu-bandar-lampung-incar-11378-pemilih-pemula.html#ixzz3sv9XkXAw>

¹³ <http://lampost.co/berita/jumlah-dpt-kota-bandar-lampung-630.366-orang>





Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

1. Pemahaman tentang Pilkada 2015
2. Pemahaman tentang Sosialisasi Politik
3. Pemahaman tentang Partisipasi Politik
4. Pemahaman tentang Politik Uang
5. Pemahaman tentang Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik

Materi yang diberikan pada pengabdian Pendidikan Politik Menjadi Pemilih Cerdas bagi Pemilih Pemula di Kota Bandar Lampung, berkaitan dengan substansi pertanyaan pada pre test dan post test. Pertama tentang apa itu pemilihan kepala daerah tujuan dan manfaatnya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Kemudian juga dijelaskan perkembangan bentuk pemilihan kepala daerah dari tidak langsung menjadi langsung. Melalui materi tersebut pemilih pemula yang terdiri dari siswa dan mahasiswa dapat mengetahui tujuan dari pemilihan kepala daerah.

Kemudian materi selanjutnya adalah tentang partisipasi politik dan sosialisasi politik, peserta dijelaskan apa saja bentuk partisipasi politik mulai dari menggunakan hak pilih pada pemilihan umum, mengikuti kampanye agar mengetahui visi dan misi calon anggota legislatif/ calon kepala daerah/ calon presiden, dan menjadi anggota partai politik. Sementara sosialisasi menjelaskan kepada pemilih pemula bahwa sosialisasi politik dari keluarga, sekolah, pendidikan, dan teman dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih dan perilaku politik pemilih.

Selain itu pemilih pemula juga mendapatkan materi tentang apa itu politik uang, dan bentuk dari politik uang serta dampaknya terhadap demokrasi. Calon kepala daerah biasanya menggunakan politik uang untuk meraih simpati masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi pragmatis dan partisipasinya yang dimobilisasi bukan partisipasi yang disebabkan oleh keinginan sendiri.

Selain itu dibahas juga materi tentang kaitan antara kebijakan publik dan pelayanan publik dengan pemilihan kepala daerah. Seperti diketahui calon petahana dalam pemilihan kepala daerah biasa menggunakan kebijakan publik yang populer agar mendapatkan dukungan atau suara dari masyarakat. Untuk itu perlu dibangun kesadaran politik pemilih pemula agar kritis terhadap kebijakan publik yang populer tapi tidak efektif. Kemudian juga perlunya perbaikan pada pelayanan publik pemerintah yang bisa dilakukan melalui pemilihan kepala daerah dengan memilih calon kepala daerah yang mementingkan kepentingan umum atau masyarakat.

B. Analisa dan Evaluasi Hasil Pengabdian

Tindakan evaluasi yang dilakukan meliputi pemberian test kepada peserta pendampingan yaitu pemilih pemula yang dilakukan sebelum diberikan materi penyuluhan atau pre-test yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan kepala daerah, partisipasi politik dan kebijakan publik. Evaluasi kedua dilakukan setelah diberikan materi pendampingan yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh peningkatan





**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Lampung**

pengetahuan dan pemahaman peserta pendampingan yaitu pemilih pemula setelah mendapatkan pendidikan politik.

Kegiatan pengabdian pendidikan politik mengundang 60 orang pemilih pemula yang terdiri dari siswa SMA dan mahasiswa di kota Bandar Lampung. Secara umum kegiatan pengabdian pendidikan politik ini telah mampu memberikan kontribusi meningkatkan pengetahuan politik mengenai pemilihan kepala daerah kepada pemilih pemula, dan memberikan pencerahan kepada pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang kritis ketika melakukan partisipasi politik pada pemilukada tanggal 9 desember 2015.

Contoh dari peningkatan tersebut adalah dari 60 orang peserta yang mengetahui bahwa kota bandar lampung akan melaksanakan pemilukada serentak pada tanggal 9 desember 2015 pada *pre test* ada 32 orang yang menjawab mengetahui dan 25 orang yang menjawab tidak mengetahui adanya pelaksanaan pemilukada. Kemudian pada saat *post test* ada perubahan setelah peserta pendampingan mendapatkan materi pendidikan politik dari 60 peserta yang mengetahui tentang pelaksanaan pemilukada ada 54 yang menjawab mengetahui, dan 6 yang menjawab tidak mengetahui, disini terlihat terdapat peningkatan yang signifikan dampak dari pendampingan terhadap pemilih pemula. Berikut ini tabel persentase pemilih pemula pada pre test dan post test tentang pelaksanaan pemilukada di kota bandar lampung pada tanggal 9 Desember 2015

Tabel 1. Pre Test Pelaksanaan Pemilukada Kota Bandar Lampung Pada Tanggal 9 Desember 2015

Pilihan	Jumlah	Presentase
Mengetahui	32	53,33%
Tidak Mengetahui	25	41,67%
Tidak Menjawab	3	5%
Total	60	100%

Sumber : data diolah

Tabel 2. Post Test Pelaksanaan Pemilukada Kota Bandar Lampung Pada Tanggal 9 Desember 2015

Pilihan	Jumlah	Presentase
Mengetahui	54	90
Tidak Mengetahui	6	10
Tidak Menjawab	0	0
Total	60	100

Sumber : data diolah

Ketidaktahuan sebagian pemilih pemula ketika sebelum mendapatkan pendampingan pendidikan politik menunjukkan bahwa banyak pemilih pemula yang belum akan sadar haknya dalam pemilukad, bahwa partisipasi politik mereka dalam pemilukada merupaka bagian penting dari demokrasi Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Dengan berpartisipasi dalam pemilukada





Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

misalnya dengan menggunakan hak pilih seperti yang dikatakan oleh Miriam Budiardjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara (bisa juga pimpinan daerah), dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).¹⁴

Contoh yang lain adanya signifikan ketika peserta pengabdian Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula ditanyakan apa tujuan dari pelaksanaan pemilukada langsung yang kita ketahui merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih.¹⁵ Pada sesi pre test dari 60 peserta, sebanyak 45 orang menjawab tahu tujuan dari pemilukada dan 11 orang menjawab tidak tahu tujuan dari pemilukada, dan 4 orang tidak menjawab.

Kemudian pada sesi post test terjadi perubahan signifikan dari 60 orang peserta, yang menjawab tahu tujuan dari pilkada meningkat menjadi 54 orang dan yang tidak tahu terdapat 6 orang peserta. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih pemula sadar bahwa pemilukada itu penting untuk memilih calon kepala daerah yang bila terpilih mampu melaksanakan fungsi pengambilan kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat dan daerahnya. Seperti kita ketahui bahwa kepala daerah adalah jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Pengertian jabatan publik mengandung pengertian bahwa kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat (publik), berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat. Berikut ini tabel presentase pemilih pemula pada pre test dan post test tentang manfaat pelaksanaan pemilukada langsung :

Tabel 3. Pre Test Manfaat Pilkada Langsung

Pilihan	Jumlah	Presentase
Mengetahui	45	75%
Tidak Mengetahui	11	18,33%
Tidak Menjawab	4	6,67%
Total	100	100%

Tabel 4. Post Test Manfaat Pilkada Langsung

Pilihan	Jumlah	Presentase
Mengetahui	54	90%
Tidak Mengetahui	6	10%
Tidak Menjawab	0	0
Total	100	100%

¹⁴ Op.cit Miriam Budiardjo

¹⁵ Op.cit Budi Winarno





Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung

Berdasarkan dua contoh pertanyaan hasil pre test dan post test dalam kegiatan pengabdian “Pendidikan Politik Menjadi Pemilih Cerdas Bagi Pemilih Pemula Di Kota Bandar Lampung Pada Pilkada 2015” menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula agar melek politik dan kritis, sehingga bisa menjadi pemilih cerdas dalam Pilkada tahun 2015. Walaupun masih ada beberapa pemilih pemula yang menjawab tidak mengetahui kapan pilkada dilaksanakan dan apa manfaat pilkada walaupun sudah mendapatkan materi tentang pendidikan politik, sehingga perlu dipikirkan perbaikan materi atau perbaikan cara penyampaian materi. Para pemilih pemula ini juga diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan yang mereka dapatkan dari pengabdian ini kepada teman, dan keluarga mereka sehingga dapat merubah budaya politik dan sikap politik masyarakat secara bertahap.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi positif bagi upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemilih pemula tentang pengertian dan manfaat pilkada langsung, kemudian pengertian partisipasi politik dan tipe partisipasi politik, hubungan kebijakan publik dan pelayanan publik dengan pilkada langsung. Sehingga diharapkan pemilih pemula bukan lagi bagian massa yang dimobilisir demi kepentingan tertentu.

Fokus pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan politik bagi pemilih pemula karena mereka adalah generasi penerus bangsa, apabila partisipasi politik mereka digerakkan karena mobilisasi bukan karena kesadaran pribadi ini tentu membahayakan perkembangan demokrasi Indonesia. Dan menciptakan masyarakat yang pragmatis dan demokrasi yang cenderung bersifat prosedural saja tanpa ada substansinya.

Kesimpulan yang didapatkan dari perbandingan hasil pre-test dengan post-test ini memang belum tentu dapat dijadikan dasar pijakan tentang legitimasi dan validitas perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang diharapkan karena karakteristik pemilih pemula yang mengikuti pengabdian pendidikan politik ini sangat beragam. Kemudian terbatasnya waktu juga mempengaruhi hasil pengabdian ini.

Kondisi sebenarnya dapat lebih baik dari pada saat penyuluhan dilakukan, atau bahkan mungkin lebih tidak baik dari apa yang dihasilkan dari hasil penilaian *post test* dalam penyuluhan ini. Pendidikan politik bagi Pemilih Pemula ini merupakan langkah awal untuk dasar berpikir langkah strategis apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka melanjutkan penyuluhan ini ke dalam bentuk kegiatan pengabdian lainnya. Hal ini untuk menyempurnakan perubahan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku pemilih pemula dalam berpartisipasi politik tidak hanya dalam Pilkada tetapi juga dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden.





**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Lampung**

B. Saran

Didasari oleh harapan bahwa pengabdian pada masyarakat dengan tema “Pendidikan Politik Menjadi Pemilih Cerdas Bagi Pemilih Pemula di Kota Bandar Lampung Pada Pilkada 2014” akan berdampak positif dalam rangka upaya-upaya menciptakan pemilih yang kritis dan cerdas dalam berpartisipasi politik, serta untuk meningkatkan angka partisipasi politik. Maka saran yang diberikan adalah :

1. Bimbingan atau pendampingan secara berkala diperlukan bukan hanya karena akan dilaksanakannya pilkada, pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Sehingga mendukung terciptanya konsolidasi demokrasi di Indonesia, kemudian mendukung pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan juga menciptaka masyarakat yang demokratis
2. Perlunya pelibatan penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan pendidikan politik yang diamanatka dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu pasal 8 ayat 1 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Pasal 13, serta juga melibatkan partai politik seperti di amanatkan dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat 4 dan Pasal 2 ayat 4.
3. Materi pendidikan politik bisa dimasukkan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan sehingga nilai-nilai demokrasi dapat dimasukkan sejak dini, dan bisa menciptakan pemilih yang cerdas sejak dini. Selain itu perlu juga melibatkan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memberikan materi pendidikan politik karena partisipasi politik adalah bagian dari hak warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Budiardjo, Miriam (Ed), *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.

Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Gaffar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Haris, Syamsudin (Ed), *Membangun Format baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2006.

_____, (Ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press-AIPI-PGRI, 2005.



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Lampung**

Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Libertry, 1992.

Held, David, *Models of Democracy*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007.

Huntington, Samuel dan Nelson, Joan, *Partisipasi Politik di Negara-negara berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

_____, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Mangiri, SK, *Kajian Pemekaran Wilayah dan Euphoria Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri, 2001.

M, Ramses Andy dan Bakry, La Editor. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009

Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Prihatmoko, J Joko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-LP3M Universitas Wahid Hasyim, 2008.

Sorensen, Georg, Terjemahan I. Made Krisna, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Sarana Indonesia, 1993.



